

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR BERBASIS KELAPA SAWIT DI DAERAH RIAU¹

(The Empowerment of Rural Community Economy Through
the Development of Oil Palm-Base Downstream Industry
in Riau Region)

Almasdi Syahza
Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PPKPEM)
Universitas Riau

Email: asyahza@yahoo.co.id; syahza@telkom.net
Website: <http://almasdi.unri.ac.id>

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Sampai tahun 2002 luas areal perkebunan kelapa sawit telah mencapai 1.312.661 ha. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya animo masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut akan diikuti oleh produksi tandan buah segar (TBS). Masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah adanya distorsi harga TBS antara petani plasma dengan petani swadaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) multiplier effect yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan; 2) daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah Riau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Kegiatan perkebunan kelapa sawit menciptakan *multiplier effect* sebesar 2,48 dan meningkatkan indek pertumbuhan kesejahteraan petani pada tahun 2003 sebesar 1,74 persen; 2) Daya dukung wilayah sangat mendukung pembangunan industri hilir kelapa sawit (PKS).

Kata kunci: Pemberdayaan, ekonomi pedesaan, industri hilir

ABSTRACT

Oil palm is an important commodity in Riau due to its strategic position since it plays an important role to support the economy, especially for plantation farmers. The total area of oil palm estate on 2002 was 1,312,661 ha. In the next future the area of oil palm estate could be expanded due to a big interest of the people toward oil palm plantation business. It was proved by the self-enlargement of oil palm plantations. The development of oil palm plantation area will certainly be followed by the production of its fresh fruit bunches. The problem faced by oil palm farmers is price distortion of fresh fruit bunch between the plasm and non plasm smallholder farmers' owners. The purpose of this study is to reveal: 1) The

¹ Dipublikasikan pada: *Sosiohumaniora*, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.

multiplier effect created by the oil palm plantation development and its impact on the prosperity of rural community. 2) Regional carrying capacity toward the development of oil palm-downstream industry in the province of Riau. This study concluded that: 1) Multiplier effect provided by oil palm plantation was 2.48 and the farmers' prosperity growth index of 1.74 percent in 2003. 2) Carrying capacity of the area was significantly affected the development of downstream oil palm industries.

Key words: *Empowerment, rural economic, downstream industry*

PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi pedesaan. Kemampuan dalam memberikan sumbangan tersebut tercermin pada penyerapan tenaga kerja serta jaminan pendapatan. Kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi krisis juga terlihat dari keadaan ekonomi pedesaan, dimana tidak memburuknya distribusi pendapatan di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Sesuai dengan target dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Riau diharapkan pendapatan petani rata-rata mencapai \$ 1,800.00 per KK per tahun (Almasdi Syahza, 2003a)

Selama periode tahun 1996-2002 perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau sangat pesat. Pada tahun 1996 luas perkebunan kelapa sawit 556.065 hektar meningkat menjadi 1.312.661 ha pada tahun 2002 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,39 persen. Perkembangan luas areal ini sangat terasa sejak mulainya krisis ekonomi di Indonesia, sehingga pada tahun 1998 luas areal kelapa sawit sudah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1996, yaitu 901.276 ha. Cepatnya perkembangan luas areal ini disebabkan oleh kenyataan pada awal masa krisis, petani kelapa sawit menikmati hasil penjualan tandan buah segar (TBS) dengan harga yang tinggi. Dengan demikian untuk tingkat ekonomi pedesaan (khususnya petani perkebunan) mengalami tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Dampak dari harga TBS ini menyebabkan tingginya keinginan masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit. Kondisi ini menjadikan daerah Riau memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, namun pada saat ini di daerah Riau terjadi ketidak seimbangan antara produksi TBS dan industri hilir (industri pengolahan CPO dan turunannya). Perluasan kebun rakyat sangat pesat tetapi tidak diimbangi dengan perluasan industri pengolahannya. Produksi hulu berupa TBS jauh lebih banyak dari daya tampung industri penghasil CPO, akibatnya terjadi kelebihan penawaran bahan baku.

Guna mengatasi ketidakseimbangan ini dan melayani perkebunan rakyat terutama skala kecil (diluar program plasma), untuk meningkatkan nilai tambah, mengurangi resiko fluktuasi harga, dan menjaga stabilitas penerimaan serta memperoleh manfaat yang lebih besar dari keberadaan kebun kelapa sawit di Riau, maka sangat penting bagi pemerintah daerah Riau untuk mendorong tumbuhnya industri-industri hilir (processing industries) berbasis kelapa sawit. Industri hilir perlu segera dibenahi mulai dari PKS sampai ke industri hilirnya yang mengolah bahan baku CPO dan turunannya. Dari sisi permintaan terhadap produk olahan CPO, prospek pengembangan industri hilir CPO juga mempunyai prospek yang cerah. Minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi bermacam-macam produk

olahan. Kebutuhan terhadap produk olahan ini akan semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyarakat konsumen.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi (Bungaran Saragih, 2001a). Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah; *pertama*, meningkatkan produktivitas kebun-kebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada mereka; dan *kedua*, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan.

Pengembangan industri berbasis kelapa sawit di daerah Riau sangat erat kaitannya dengan daya dukung wilayah untuk penyediaan bahan baku. Tanpa tersedianya bahan baku yang cukup, kelangsungan produksi industri kelapa sawit akan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan analisis daya dukung wilayah guna mendukung pengembangan industri hilir di Propinsi Riau. Menurut Sostroamidjojo dan Entang (1975), pengukuran dari daya dukung wilayah didasarkan pada kemampuan lahan (*land capability*). Pada umumnya kemampuan lahan dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan lahan dalam fungsinya sebagai media tumbuh untuk mencapai tingkat produksi tertentu.

Keterkaitan antara daya dukung wilayah dengan industri tersebut didukung oleh pendapat Mellor (1976), pembangunan di sektor industri dan sektor pertanian saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Sektor pertanian memproduksi berbagai produk konsumsi dan bahan baku sektor industri (agroindustri), sedangkan sektor industri memproduksi berbagai kebutuhan untuk sektor pertanian. Studi yang dilakukan oleh Mellor (1984), telah menunjukkan adanya hubungan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan hubungan tersebut meningkat sejalan dengan tumbuhnya perekonomian. Stagnasi yang terjadi pada sektor pertanian akan dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, khususnya agroindustri karena terlambatnya aliran bahan baku dari pertanian yang diperlukan. Sebaliknya jika terjadi kemunduran di sektor industri, maka sektor pertanian mengalami kesulitan untuk memperoleh barang-barang yang diperlukan. Walaupun seluruh sektor dalam perekonomian menurut para ahli saling ada keterkaitan satu sama lain, akan tetapi kuat atau lemahnya keterkaitan antar sektor sangat berbeda.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian (Bungaran Saragih, 2001b).

Dari potensi yang ada, pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat

pertumbuhan wilayah (Almasdi Syahza,2002). Dengan demikian kelapa sawit diharapkan menjadi sektor basis ekonomi pedesaan di daerah Riau.

Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang berorientasi ekspor sehingga menyebabkan terjadinya arus dana masuk dari luar wilayah. Jika permintaan terhadap hasil sektor basis meningkat maka usaha-usaha yang memasok bahan baku bagi sektor basis tersebut akan ikut berkembang dan dana yang mengalir ke dalam wilayah akan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa di dalam wilayah, peningkatan pendapatan per kapita, dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut, sehingga secara keseluruhan perekonomian wilayah akan tumbuh (Richardson, 2001). Teori sektor basis bertujuan untuk menganalisis suatu kegiatan (industri) yang merupakan sektor utama pada suatu wilayah, dimana sektor ini akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah dan sekitarnya.

Industri-industri basis adalah industri yang selain memasarkan hasil produksinya di dalam wilayah ekonominya sendiri, juga memasarkan hasil produksinya ke luar dari batas wilayah ekonominya (ekspor) sehingga akan menambah arus pendapatan dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan. Setiap perubahan volume hasil produksi industri basis akan menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian wilayah (Glasson, 1990).

Penelitian ini menganalisis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah pedesaan Riau. Untuk itu rumusan masalah yang diteliti: 1) Apakah pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat menciptakan *multiplier effect* yang besar di daerah pedesaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan ? 2) Apakah daya dukung wilayah berpotensi untuk pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau ?

Berdasarkan gambaran dan permasalahan di atas, maka maksud melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) besar *multiplier effect* yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan; 2) daya dukung wilayah terhadap prospek pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah Riau. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan melalui pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit di daerah Riau.

Berdasarkan masalah dan kerangka pemikiran yang dikemukakan di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan uji hipotesis, yaitu: 1) Pembangunan industri hilir berbasis kelapa sawit menciptakan *multiplier effect* ekonomi yang besar terhadap kegiatan ekonomi pedesaan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitarnya; 2) Daya dukung wilayah (DDW) Riau sangat menopang pengembangan industri hilir kelapa sawit, terutama dalam penyediaan bahan baku.

Hasil penelitian ini diharapkan ditemukan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis kelapa sawit. Model yang dimaksudkan untuk mencoba menetralsir dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (Developmental Research). Penelitian ini dilakukan di daerah Riau dengan pemilihan lokasi secara *Multistages cluster sampling* di wilayah pengembangan perkebunan kelapa sawit. Daerah terpilih adalah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan kedua kabupaten tersebut, antara lain: 1) dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi Riau, daerah tersebut merupakan bahagian dari pusat pengembangan perkebunan khususnya kelapa sawit; 2) umur kelapa sawit di kedua lokasi pada usia produksi optimum yaitu umur 10 sampai 16 tahun (baik produksi TBS, minyak sawit, dan inti sawit); 3) pada daerah Kabupaten Kampar dikembangkan perkebunan plasma kelapa sawit dengan perusahaan BUMN sebagai inti, di daerah Kabupaten Pelalawan dikembangkan perkebunan kelapa sawit dengan perusahaan swasta sebagai inti; 4) kedua daerah dapat mewakili wilayah pengembangan perkebunan yaitu Kabupaten Kampar mewakili Riau Barat dan Kabupaten Pelalawan mewakili Riau Timur; 5) di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit kedua kabupaten tersebut banyak masyarakat tempatan melakukan usahatani kelapa sawit secara swadaya; dan 6) dari kedua kabupaten tersebut mempunyai produktivitas kebun yang berbeda (untuk TBS Kabupaten Kampar 3,00 ton per hektar dan Kabupaten Pelalawan 2,68 ton per hektar, untuk minyak sawit di Kabupaten Kampar 21,87 % dan Kabupaten Pelalawan 21,25 %).

Sampel diambil dari masyarakat di daerah penelitian yang terpilih. Rumus untuk ukuran sampel adalah (Cochran. William G, 1991):

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} \left[1 + \frac{1}{N} \left(\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right) \right]$$

Keterangan: n adalah ukuran sampel; P merupakan proporsi dari masing-masing kelompok sampel (plasma dan swadaya) pada kelas yang terpilih; sedangkan Q = 1 - P. N adalah ukuran populasi; Z adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan, dan d = standar error. Penelitian ini menggunakan batas probabilitas keyakinan sebesar 95 persen.

Pada masing-masing cluster yang terpilih, diambil dua macam responden, yaitu responden dari peserta plasma kelapa sawit (BUMN atau perusahaan swasta) dan responden dari daerah sekitarnya (masyarakat tempatan) yang melakukan kegiatan usahatani kelapa sawit (swadaya murni). Dari masing-masing daerah terpilih sebagai sampel, ditentukan proporsi (P) dari masing-masing kelompok sampel yaitu petani plasma dan petani swadaya. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Petani Kelapa Sawit pada Daerah Sampel Tahun 2002

Kabupaten	Petani Kelapa Sawit (KK)		
	Plasma	Swadaya	Jumlah
Kampar	33.156	13.050	46.206
Pelalawan	15.972	3.039	19.011
Jumlah	49.128	16.089	65.217
	75 %	25 %	100 %

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2003

Dengan menggunakan rumus Cochran, maka diperoleh ukuran sampelnya sebesar 284 responden. Untuk lebih jelasnya ukuran sampel disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ukuran Sampel pada Masing-masing Daerah Terpilih

P	Q	d	Z	n	Ukuran Sampel	
					Plasma	Swadaya
75%	25%	5%	1,96	284	214	70
Kabupaten Kampar				201	144	57
Kabupaten Pelalawan				83	70	13

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari petani dan tokoh masyarakat yang terdapat di daerah lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Analisis ekonomi masyarakat pedesaan di daerah Riau sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif mencakup: pemilikan lahan, peluang kerja, peluang usaha, dan diversifikasi usaha, sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan.

Pengujian hipotesis pertama

Pendekatan penciptaan *multiplier effect* pada kegiatan industri hilir kelapa sawit digunakan formula sebagai berikut (Tiebout dalam Tulus T.H. Tambunan, 2001).

$$K = \frac{1}{1 - (MPC \times PSY)}$$

Keterangan: K adalah pengaruh ekonomi wilayah (*multiplier effect*); MPC merupakan proporsi pendapatan petani yang dibelanjakan di daerah tersebut; dan PSY adalah bagian dari pengeluaran petani yang menghasilkan pendapatan di daerah tersebut atau persen kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi oleh wilayah setempat. Semakin tinggi angka *multiplier effect* kegiatan perkebunan kelapa sawit (K) maka semakin tinggi pula perputaran uang di daerah pedesaan.

Untuk mengetahui tingkat kemakmuran dan tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama di sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit dilakukan pengujian dengan rumus sebagai berikut (Todaro, Michael P, 2000):

$$G = w_1 g_1 + w_2 g_2 + \dots + w_i g_i$$

G adalah indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial; **g_i** adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke *i*; dan **w_i** merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke *i*.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai indeks pertumbuhan kesejahteraan (**G**) dari periode ke periode.

Pengujian hipotesis kedua

Analisis daya dukung wilayah dilakukan untuk mengetahui kemampuan wilayah daerah Riau dalam menyediakan bahan baku untuk industri kelapa sawit yaitu berupa tandan buah segas (TBS). Untuk mengetahui daya dukung wilayah tersebut digunakan data produksi kelapa sawit dan jumlah kebutuhan bahan baku untuk industri hilir kelapa sawit (PKS). Secara matematis daya dukung wilayah terhadap industri kelapa sawit adalah:

$$DDW = \frac{L_i \times P_i}{KBB}$$

DDW merupakan daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit, *L_i* adalah luas perkebunan kelapa sawit di daerah Riau, *P_i* adalah produktivitas perkebunan kelapa sawit per hektar, dan KBB merupakan kebutuhan bahan baku industri hilir kelapa sawit dalam bentuk tandan buah segar.

Apabila hasil perhitungan menunjukkan rasionya > 1, maka daya dukung wilayah dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit cukup kuat, dan sebaliknya apabila rasionya < 1, daya dukung wilayah sangat lemah untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Analisis Multiplier Effect Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan

Analisis Multiplier Effect

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Pada umumnya masyarakat pedesaan hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Dari sisi kebutuhan rumah tangga rata-rata pengeluaran petani setiap bulannya sebesar Rp 1.183.288. Persentase masing jenis pengeluaran rutin petani kelapa sawit di pedesaan disajikan pada Tabel 3. Pengeluaran terbesar adalah kebutuhan hidup keluarga (kebutuhan dapur).

Tabel 3 Rataan Jenis Pengeluaran Rutin Petani Kelapa Sawit Per Bulan

Jenis Pengeluaran	Plasma		Swadaya	
	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1 Dapur (harian)	629.206	53,00	592.857	50,62
2 Listrik	74.918	6,31	64.471	5,51
3 Telepon	19.556	1,65	29.286	2,50
4 Transportasi	90.234	7,60	95.161	8,13
5 Kesehatan	5.397	0,45	6.143	0,52
6 Rekreasi	15.935	1,34	18.500	1,58
7 Pendidikan	287.897	24,25	297.786	25,43
8 Asuransi kebun	28.794	2,43	22.686	1,94
9 Sosial	35.336	2,98	44.214	3,78
Jumlah	1.187.273	100	1.171.104	100

Komponen pengeluaran untuk kebutuhan hidup petani (dapur) adalah sembilan kebutuhan pokok. Transportasi berupa biaya operasional kendaraan pribadi dan ongkos angkutan umum. Komponen pengeluaran rekreasi, antara lain ke kota mengunjungi keluarga, anak, dan jalan-jalan. Untuk komponen pendidikan termasuk besar, karena kesadaran bagi petani untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Semua bentuk pengeluaran oleh petani apakah pengeluaran rutin atau pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kebun, pada umumnya dapat diperoleh di daerah, antara lain; pasar kecamatan, pasar desa, kedai-kedai, koperasi petani, atau pada pedagang keliling. Khusus untuk kebutuhan sarana produksi pada umumnya memakai alat hasil produksi daerah pedesaan (industri rumah tangga) seperti, angkong (gerobak), dodos, parang, engrek, tojok, dan cangkul. Sedangkan untuk jenis alat penyemprot hama (*sprayer*) kebanyakan dibeli di pasar kabupaten.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata perputaran uang yang terjadi di lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Dengan menggunakan rumus angka pengganda tersebut diperoleh nilai MPC = 0,8415 dan nilai PSY = 0,7079, sehingga diperoleh angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248,00 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa konstruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (Almasdi Syahza, 2003c).

Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Kelapa Sawit

Tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 persen. Di Tabel 4 terlihat pada 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar -1,09 %. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan, yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 328 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar -156 persen.

Tabel 4 Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995 ¹⁾		1998 ²⁾		2003 ³⁾	
	w	g	w	G	w	g
20 % terendah	0,081	-0,008	0,151	0,071	0,117	-0,034
20 % terendah kedua	0,127	0,009	0,195	0,068	0,158	-0,036
20 % terendah ketiga	0,144	-0,006	0,215	0,071	0,183	-0,032
20 % terendah keempat	0,196	-0,012	0,201	0,006	0,211	0,010
20 % pendapatan tertinggi	0,454	0,017	0,238	-0,216	0,331	0,093
Indeks Pertumbuhan Kesejahteraan	0,49		-1,09		1,72	

Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1995
 2) Almasdi Syahza, 1998
 3) Hasil Survey, 2003

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah (Almasdi Syahza, 2003b).

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

2. Analisis Daya Dukung Wilayah

Luas kebun kelapa sawit di masa datang diprediksi akan selalu bertambah, karena tingginya animo masyarakat terhadap perusahaan kelapa sawit. Seiring dengan pertambahan luas areal akan diikuti dengan peningkatan produksi TBS. Kondisi ini juga akan menyebabkan kapasitas pengolahan TBS semakin dibutuhkan baik dari segi jumlah maupun dari segi kapasitas olahannya. Begitu juga untuk luas yang ada, produksinya akan bertambah karena masih banyaknya tanaman yang belum menghasilkan. Sampai tahun 2003 luas tanaman yang belum menghasilkan sebanyak 415.699 ha yang tersebar di duabelas daerah kabupaten/kota. Untuk itu diperlukan analisis daya dukung wilayah (DDW) dalam penyediaan bahan baku PKS. Hasil perhitungan perkembangan DDW disajikan pada Lampiran 30, sedangkan perhitungan untuk tahun 2002 disajikan pada Tabel 5.

Dari hasil perhitungan DDW yang disajikan pada Tabel 5 diperlihatkan dua model perhitungan, yakni perhitungan dengan hanya memperhatikan tanaman menghasilkan dan perhitungan dengan memasukkan tanaman belum menghasilkan. Dari perhitungan pertama diperoleh angka indeks DDW sebesar

2,241. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Setiap satu satuan kemampuan olah PKS didukung oleh bahan baku TBS sebanyak 2,241 satuan. Untuk masa yang akan datang produksi TBS mengalami peningkatan karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, maka DDW meningkat menjadi 3,281.

Tingginya angka DDW ini juga memperlihatkan melimpahnya bahan baku yang tersedia. Kelebihan bahan baku ini akan menyebabkan tidak efisiennya proses produksi. Dari sisi lain akan menyebabkan penurunan harga jual oleh petani itu sendiri. Karena kondisi pasar yang dihadapi oleh pihak petani adalah monopsonistik, maka petani tidak memiliki kekuatan tawar menawar, sehingga petani hanya sebagai penerima harga dari pihak pedagang (kaki tangan PKS). Kondisi ini juga menyebabkan harga TBS ditingkat petani sangat berfluktuasi, terutama bagi petani swadaya murni.

Tabel 5 Luas Areal, Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Kapasitas Olah PKS dan Analisis DDW Industri Hilir di Riau Tahun 2002

Kabupaten	Luas Tanaman		Produktivitas (ton/ha)	Kapasitas PKS (ton/jam)	DDW *
	TBM	TM			
Kampar	42.282	70.484	2,968	945	1,339
Rokan Hulu	99.341	195.186	2,052	385	2,601
Pelalawan	29.625	132.875	3,550	385	3,063
Bengkalis	18.060	65.084	2,284	-	-
Rokan Hilir	36.745	85.223	3,846	505	1,623
Siak	41.137	90.031	4,525	450	2,263
Dumai	7.717	7.863	0,638	-	-
Indragiri Hilir	36.715	25.872	3,059	120	1,649
Indragiri Hulu	28.037	68.926	3,984	255	2,692
Kuantan Singingi	74.758	49.142	1,220	345	0,434
Kepulauan Riau	1.282	3.603	3,379	-	-
Natuna	-	700	0,850	-	-
Total	415.699	894.989	3,395	3.390	2,241
DDW untuk tanaman menghasilkan					2,241
DDW untuk tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan					3,281

Keterangan: * Hasil Perhitungan

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Tahun 2003

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ekonomi masyarakat pedesaan dapat diberdayakan melalui pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, alasan ini didasarkan kepada hasil temuan-temuan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan angka *multiplier effect* sebesar 2,48, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha. Tingkat pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 2003 meningkat menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 1,72 persen.
2. Daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Untuk masa yang akan datang diyakini produksi TBS akan meningkat karena masih ada kebun yang belum menghasilkan. Jika diasumsikan semua kebun baik tanaman belum menghasilkan (TBM) dan tanaman menghasilkan (TM) berproduksi, nilai DDW sebesar 3,281.

Saran

1. Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.
2. Pembangunan industri hilir kelapa sawit harus dirancang dalam bentuk agroestat kelapa sawit. Konsep agroestat kelapa sawit merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan inti dengan petani peserta dalam bentuk kepemilikan kebun dan saham pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS.
3. Pembangunan agroestat yang dirancang harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.
4. Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almasdi Syahza,, 1995. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Peserta PIR-BUN Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Propinsi Riau, Tesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 1998. *Evaluasi Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Strategi Pengembangannya di Daerah Riau*, Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru

- ., 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- ., 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 2003b. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- ., 2003c. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Bungaran Saragih., 2001a. *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*, Yayasan USESE, Bogor.
- ., 2001b. *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Yayasan USESE, Bogor.
- Cochran, William G., 1991. *Teknik Penarikan Sampel*, UI-Press, Jakarta.
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2003, *Laporan Tahunan*, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Glasson. John., 1990, *Pengantar Perencanaan Regional (An Introduction to Regional Planning)*, Terjemahan Paul Sitohang, FE-UI, Jakarta.
- Mellor, John W., 1976, *The New Economics of Growth: A Strategy for India and the Developing Word*, dalam Sadono Sukirno, 1985, *Ekonomi Pembangunan*, FE-UI, Jakarta.
- ., 1984, *Agriculture Development and Inter-Sectoral Transfer of Resources*, dalam C.K Eicher dan J.M. Staatz, 1984, *Agriculture Development in the Third World*, John Hopkin University Press, Baltimore.
- Richardson. Harry W., 2001, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sitohang, FE-UI, Jakarta.
- Sostroamidjojo dan Entang., 1975, *Ekonomi Pembangunan*, Armico, Bandung.
- Todaro, Michael P., 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi ke tujuh, Erlangga, Jakarta.
- Tulus T.H. Tambunan., 2001. *Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.